

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan Provinsi yang memiliki luas wilayah pada urutan kedua terkecil di Indonesia, sedangkan di urutan pertama adalah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah Pemerintah Provinsi DIY sebesar 3.185,80 km<sup>2</sup> apabila dibandingkan dengan luas keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar 0,17 persen

Berikut ini adalah batasan-batasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara geografis:

Barat : Kabupaten Purworejo

Utara : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali

Timur : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri

Selatan: Samudra Hindia

Dengan rincian daerah yang menempati wilayah administrasi terluas adalah Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sebesar 46,62 persen dari keseluruhan luas DIY, sementara untuk wilayah Kota Yogyakarta sendiri memiliki luas yang terkecil yaitu sebesar 32,5 km<sup>2</sup> atau 0,01 persen dari keseluruhan luas DIY, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di DIY menurut Kabupaten/Kota**

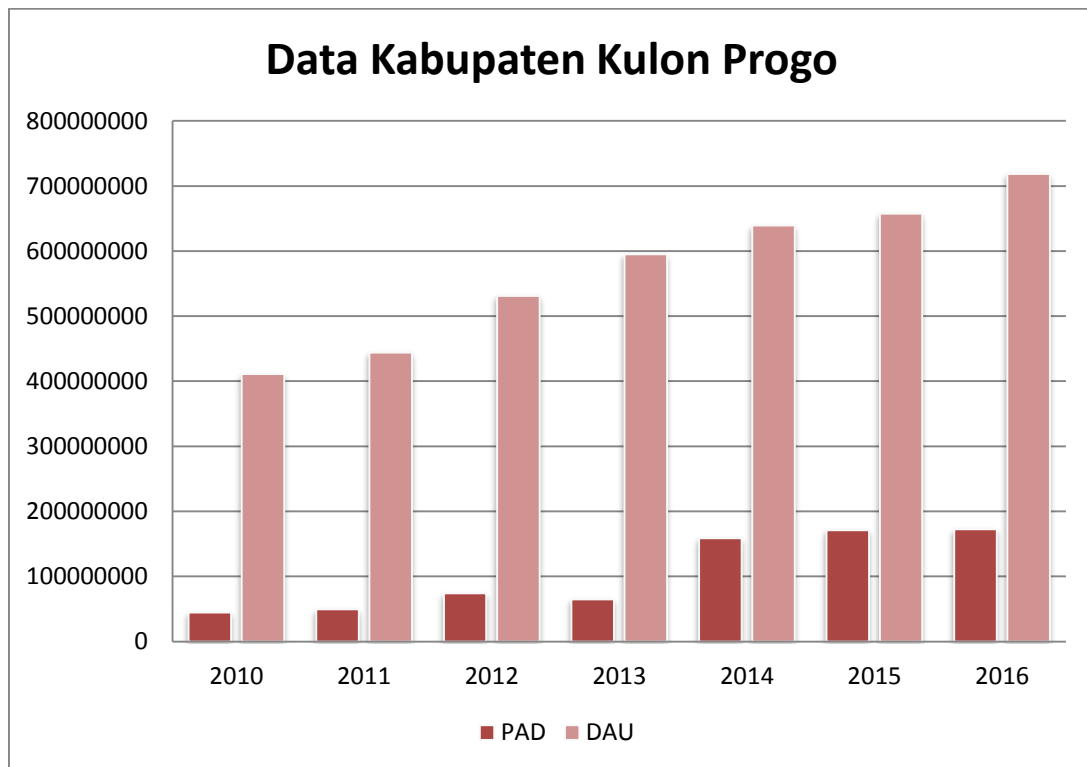
Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Perkotaan	Pedesaan
Kulonprogo	586,7	12	88	13	75
Bantul	506,85	17	47	47	28
Gunung Kidul	1485,36	18	144	5	139
Sleman	574,82	17	86	59	27
Yogyakarta	32,50	14	45	45	-
DIY	3185,80	78	438	169	269

(Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) DIY 2017 (diolah peneliti))

Obyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini jenisnya adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu berupa data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil yang diakses melalui situs resmi Biro Pusat Statistik (BPS).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dengan periode waktu dari tahun 2010-2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian mengenai data yang dihimpun, dikumpulkan serta dinyatakan dalam bentuk angka, walaupun berupa data kualitatif sebagaipendukungnya, antara lain kata serta kalimat yang tersusun pada angket, kalimat yang berupa hasil dari konsultasi atau wawancara antara peneliti dengan informan. Berikut komposisi antara dana pertimbangan dengan pendapatan daerah sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa

terjadi *flypaper effect* pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 yang diolah berdasarkan data BPS, dapat dilihat pada gambar:



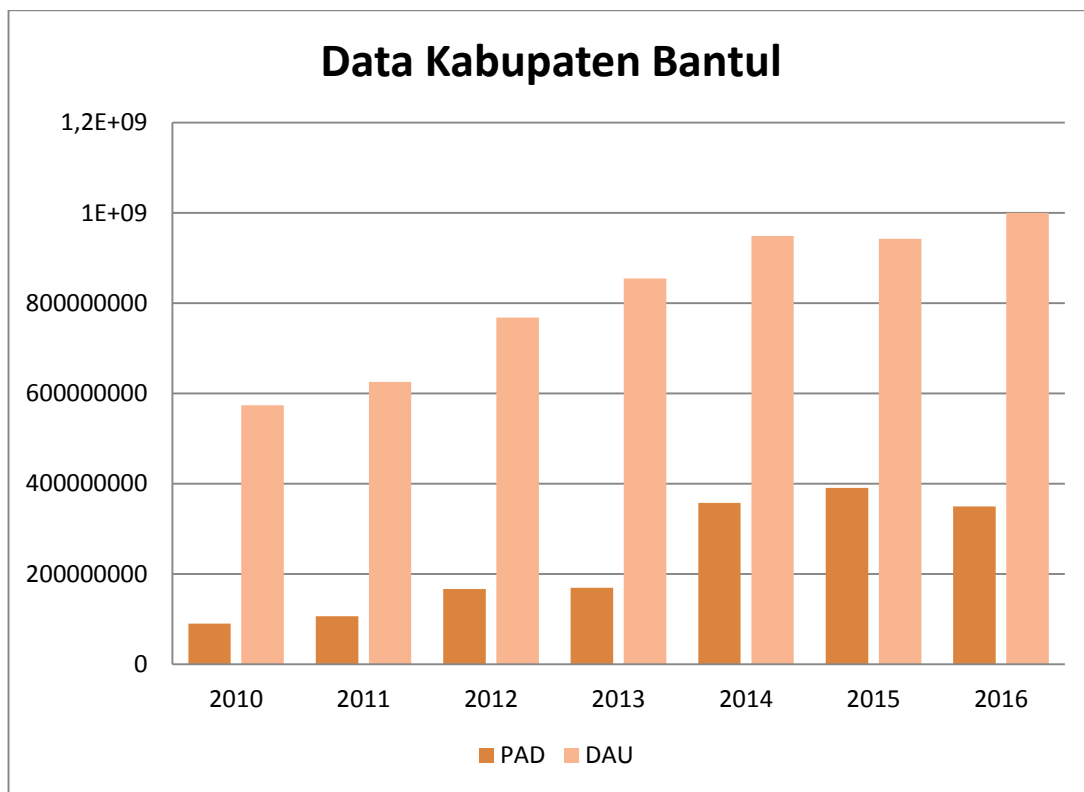
Gambar 4.1

Perbandingan PAD, DAU Kabupaten Kulon Progo

Tahun anggaran 2010-2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2016 (diolah oleh peneliti)

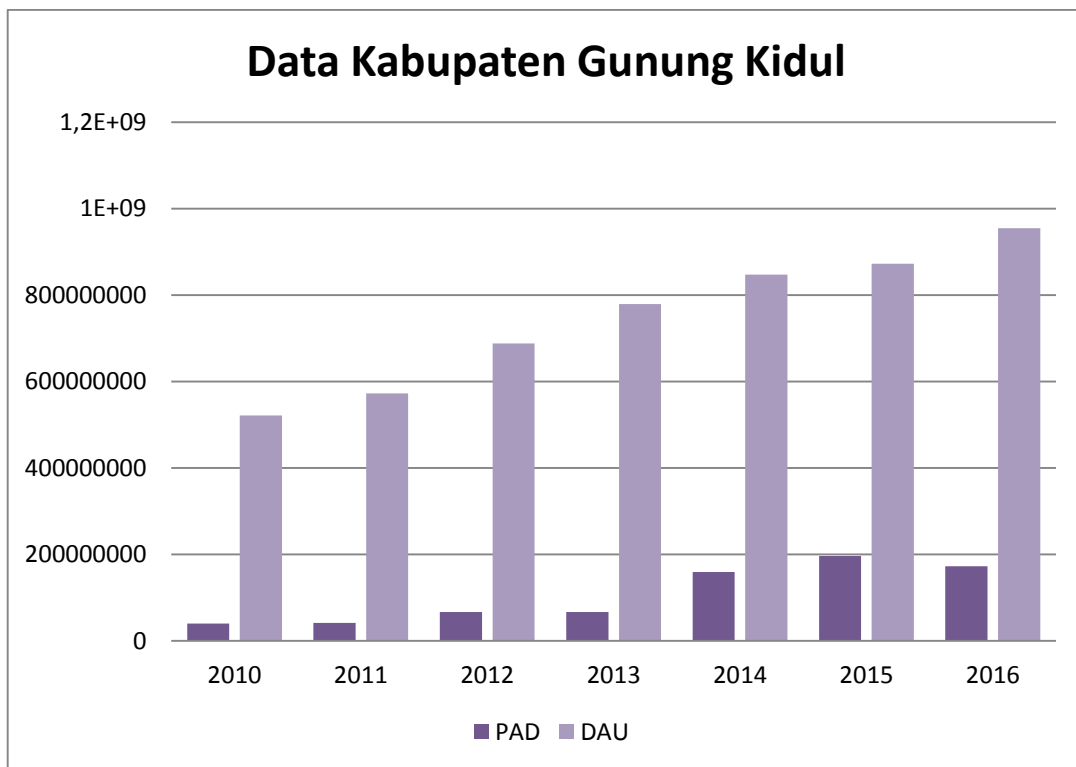
Data diatas merupakan data perbandingan DAU dan PAD dari tahun 2010-2016 khusus Kabupaten Kulon Progo, dapat dilihat bahwa PAD dikabupaten ini semakin tahun semakin naik walaupun masih belum mampu mengejar atau mengimbangi jumlah DAU. Hal ini dikarenakan daerah Kulon Progo merupakan kabupaten dengan PAD terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 4.2  
Perbandingan PAD, DAU Kabupaten Bantul  
Tahun anggaran 2010-2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2016 (diolah oleh peneliti)

Data diatas merupakan data perbandingan DAU dan PAD dari tahun 2010-2016 khusus Kabupaten Bantul, dapat dilihat bahwa PAD dikabupaten ini semakin tahun semakin naik walaupun masih belum mampu mengejar atau mengimbangi jumlah DAU. Namun daerah Bantul masih dikatakan sedang apabila dibandingkan PAD Kulon Progo, hal ini dikarenakan daerah Bantul mayoritas bekerja sebagai petani selain itu terdapat banyak lowongan untuk berwira usaha sehingga mencari pekerjaan bukan hal yang sulit.

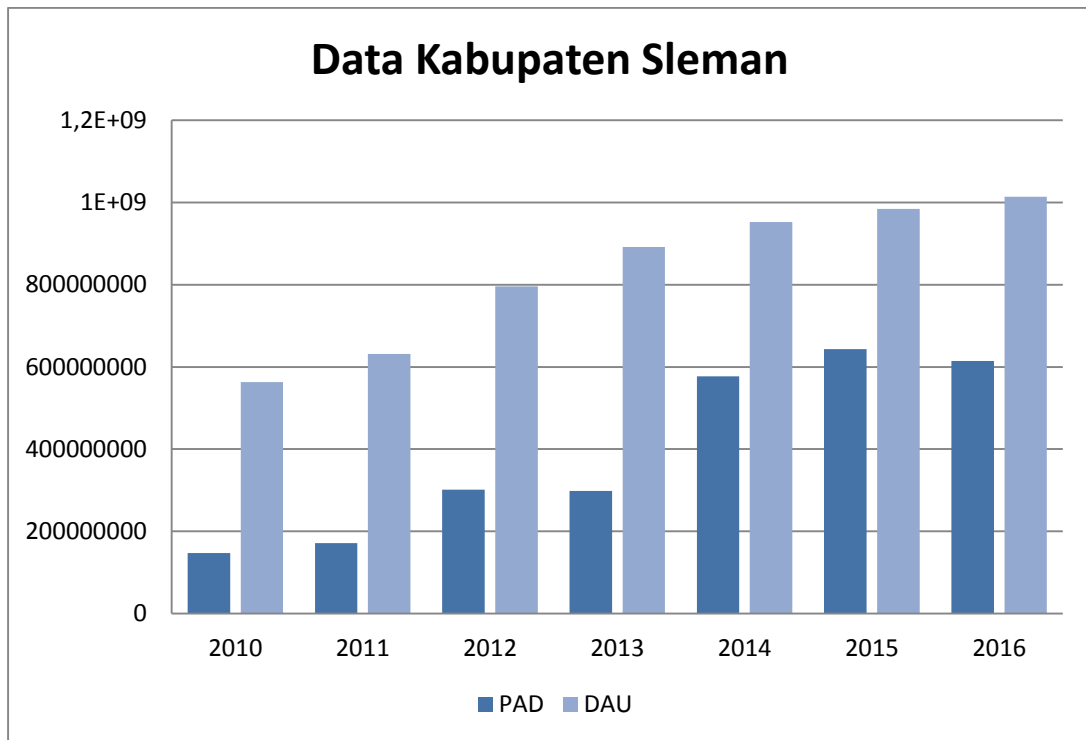


Gambar 4.3

Perbandingan PAD, DAU Kabupaten Gunung Kidul  
Tahun anggaran 2010-2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2016 (diolah oleh peneliti)

Data diatas merupakan data perbandingan DAU dan PAD dari tahun 2010-2016 khusus Kabupaten Gunung Kidul, dapat dilihat bahwa PAD dikabupaten ini semakin tahun semakin naik walaupun masih belum mampu mengejar atau mengimbangi jumlah DAU. Sama halnya dengan daerah Kulon Progo, daerah ini termasuk yang terendah jika dibandingkan dengan daerah lain hal ini dikarenakan daerah ini merupakan daerah dipesisir laut yang letaknya sebenarnya sangat menjangkau akan tetapi pemerintah belum mampu mengoptimalisasi sumber pariwisata dan perikanan dengan baik.

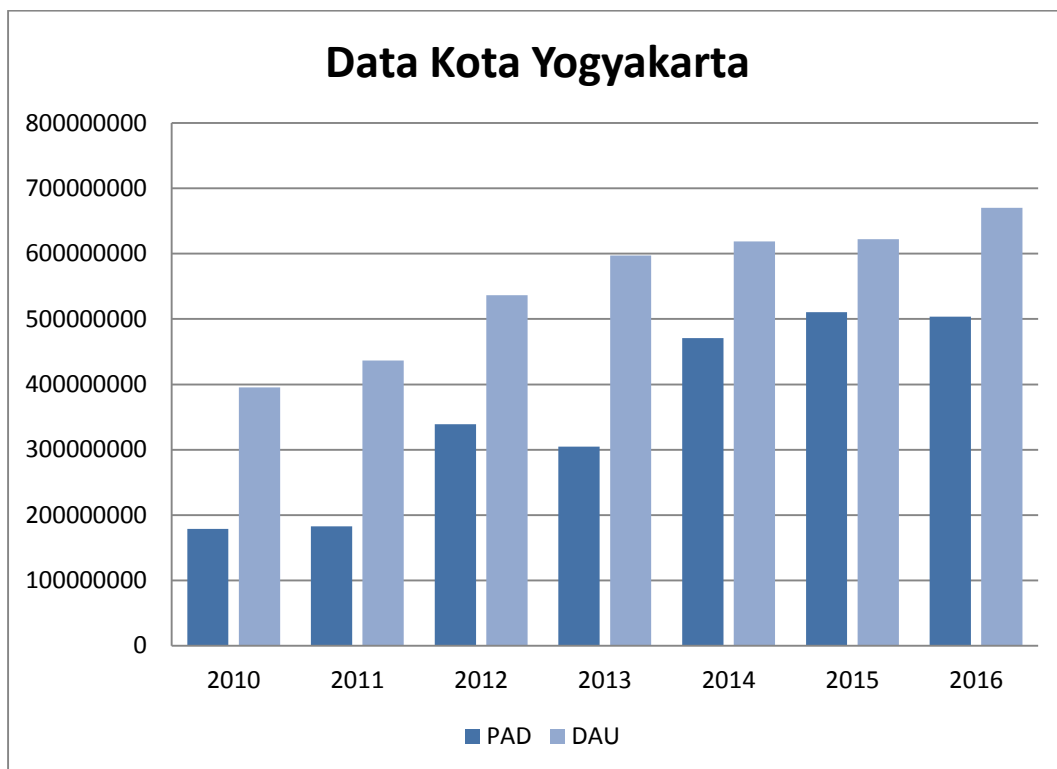


Gambar 4.4

Perbandingan PAD, DAU Kabupaten Sleman  
Tahun anggaran 2010-2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2016 (diolah oleh peneliti)

Data diatas merupakan data perbandingan DAU dan PAD dari tahun 2010-2016 khusus Kabupaten Sleman, dapat dilihat bahwa PAD dikabupaten ini semakin tahun semakin naik walaupun masih belum mampu mengejar atau mengimbangi jumlah DAU. Daerah sleman merupakan daerah dengan mobilitas yang cukup tinggi sehingga PAD nya pun juga naik, hal ini dikarenakan kemampuan PEMDA Sleman yang mampu mengelola kotanya dengan teratur.



Gambar 4.5

Perbandingan PAD, DAU Kota Yogyakarta  
Tahun anggaran 2010-2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2016 (diolah oleh peneliti)

Data diatas merupakan data perbandingan DAU dan PAD dari tahun 2010-2016 khusus Kota Yogyakarta, dapat dilihat bahwa PAD dikabupaten ini semakin tahun semakin naik walaupun masih belum mampu mengejar atau mengimbangi jumlah DAU. Kota Yogyakarta adalah kota dengan PAD yang sangat tinggi, bahkan hampir menyaingi DAU, hal ini dikarenakan Kota ini letaknya strategis, dengan icon Provinsi DIY yang melekat pada kota ini.

## B. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif menggambarkan deskripsi antara variabel dependen dengan variabel independen secara statistik pada penelitian ini. Dalam analisis statistik deskriptif yang disajikan meliputi jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum serta nilai maksimum, dan atas variabel-variabel penelitian. Variabel yang dimaksud meliputi PAD, DAU, DBH dan BD, untuk hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Deskriptif Data**

Valid	BD	PAD	DAU	DBH
Missing	35	35	35	35
Mean	1435290603	2386049441	704462363	44306159
Std Eror	99836590	29758250	31104271	3942394
Median	1380351871	172352154,00	657260489,00	36320597,0000
Mode	601285661,0	39756344,00	395444062,00	18931791,00
Std Deviation	590641232	176052183	184015348	23323519
Range	2223823144	603373736,00	618866568,00	85707096,00
Minimum	601285661,0	39756344,00	395444062,00	18931791,00
Maximum	2825108805	643130080,00	1014310630,00	104638887,00
Sum	50235171118	8351173057,00	24656182689	1550715561

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2017

Tabel 3 menunjukkan gambaran statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian. Variabel Belanja Daerah memiliki nilai minimum 601285661,00 nilai maksimum 2825108805,00 nilai rata-rata 1435290603,3714 dan nilai standar deviasi sebesar 590641231,94563. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum 39756344,00, nilai maksimum 643130080,00, nilai rata-rata 238604944,4857 dan nilai standar deviasi sebesar 76052183,25409. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai



minimum 395444062,00 nilai maksimum 1014310630,00 nilai rata-rata 704462362,5429. Variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai minimum 18931791,00 nilai maksimum 104638887,00 dan nilai rata-rata 44306158,8857.

### C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukannya analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi:

#### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Oleh karena itu dilakukanlah uji one sample kolmogorov smirnov, suatu data dapat dikatakan normal apabila nilai Asymp.Sig(2-tailed) > 0,05.

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel: 4.3:**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000003
	STD Deviation	129253024.0
Most Extreme Differences	Absolute	.143
	Positive	.096
	Negative	-.143
Kolmogorov-Smirnov Z		.845
Asymp Sig (2 Tailed)		.473

*Sumber: Hasil pengolahan data sekunder 2017*

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,473 > (0,05), dapat dilihat bahwa nilai sig melebihi dari 0,05 yang berarti data berdistribusi atau menyebar secara normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2006), cara melihat apakah telah terpenuhi uji multikolinieritasnya adalah dengan melihat dari nilai *Tolerance* atau *Variance Inflation Factor* > 0,1 atau VIF < 10, jika hal ini terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan dalam tabel dibawah ini

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	.645	1.551
DAU	.624	1.602
DBH	.872	1.147

a. Dependent Variable: BD

*Sumber: Hasil pengolahan data sekunder 2017*

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai tolerance sebesar  $0,645 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1,551 < 10$ . Variabel DAU memiliki nilai tolerance sebesar  $0,624 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1,602 < 10$ . Variabel DBH memiliki nilai tolerance sebesar  $0,872 > 0,1$  sedangkan nilai VIF sebesar  $1,147 < 10$  hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen bebas dari gejala multikolinieritas.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan atau perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi heterokedastisitas digunakan uji glejser, suatu model dapat dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas apabila nilai sig > 0,05. Hasil uji heterokedastisitas disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel.4.5**  
**Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	8E + 007	7E + 007		1.037	.308
PAD	.133	.100	.284	1.336	.191
DAU	-.044	.097	-.098	-.451	.655
DBH	.488	.648	.138	.753	.457

*Sumber: Hasil pengolahan data sekunder 2017*

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan nilai sig untuk masing-masing variabel bebas atau variabel independen terhadap nilai absolute residual (ABS\_RES) > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi korelasi antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data runtutan waktu (*time series*), kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Model regresi dapat dikatakan baik apabila terbebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dibuktikan dengan

menggunakan uji *durbin watson*. Suatu data dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi jika nilai DW berada diantara  $d_U$  dan  $(4-d_U)$ . Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.976	.952	.947	135362798	1.726

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder 2017

Berdasarkan tabel 7 pengujian *Durbin-Watson* dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai *Durbin-Watson*(DW) sebesar 1.726, apabila dilihat dengan tabel durbin watson nilai  $d_L = 1.2833$  sedangkan nilai  $d_U = 1.6528$  sehingga  $4 - d_U = 2.3472$ , dapat disimpulkan bahwa hasil nilai DW berada pada  $1.6528 < 1.726 < 2.3472$  maka sesuai dengan kriteria jika  $d_U < DW \text{ hitung} < 4 - d_U$  maka tidak terjadi autokorelasi.

#### **D. Hasil Uji Hipotesis**

Pengujian regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. Untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan program SPSS versi 16.0.

Hasil perhitungan regresi digunakan untuk pengujian hipotesis yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Regresi Berganda**

Mode	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std Error	Beta		
(Constanta)	-3E + 008	1E+008		-2.306	.028
PAD	1.708	.164	.507	10.404	.000
DAU	1.915	.160	.597	11.994	.000
DBH	-1.033	1.066	-.041	-.970	.340

*Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2017*

Hasil perhitungan regresi pada tabel 8 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$BD = -3E+008 + 1.708 PAD + 1.915 DAU + (-1.033) DBH + e \dots\dots\dots$$

Dengan keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

BD = Belanja Daerah

e = Error

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diatas, dapat dijabarkan hasil uji hipotesis berikut:

### 1. Uji Nilai t

Pengujian nilai t bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dengan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dalam penelitian ini. Selain itu digunakan untuk menunjukkan arah masing-masing variabel yang dapat dilihat dari tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa :

#### a. Uji Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

Dari hasil uji hipotesis pertama di peroleh nilai t sebesar 10,404 dan nilai koefisien regresi positif sebesar 1,708 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ , artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama **diterima**.

#### b. Uji Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

Dari hasil uji hipotesis kedua diperoleh nilai t sebesar 11,994 dan nilai koefisien regresi positif sebesar 1,915 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ , artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua **diterima**.

c. Uji Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )

Dari hasil uji hipotesis ketiga di peroleh nilai t sebesar -970 dan nilai koefisien regresi negatif sebesar -1.033 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,340 < \alpha (0,05)$ , artinya Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **ditolak**.

**Tabel 4.8 :**  
**Hasil Ringkasan Hipotesis Penelitian**

Ket	Hipotesis	Hasil Penelitian	Hasil Nilai Sig
H <sub>1</sub>	PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah	Diterima dengan sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$
H <sub>2</sub>	DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah	DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah	Diterima dengan sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$
H <sub>3</sub>	DBH berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah	DBH tidak signifikan terhadap Belanja Daerah dan berpengaruh negatif	Ditolak dengan sig sebesar $0,340 < \alpha (0,05)$

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

**2. Uji Nilai F**

Pengujian nilai F ini bertujuan untuk membuktikan apakah semua variabel independen yang ada dalam model regresi secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Hasil uji F disajikan dalam tabel dibawah ini

**Tabel: 4.9 Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	1. 1E+019	3	3.764E+018	205.444	.000 <sup>a</sup>
Residual	2. 7E+017	31	1.883E+016		
Total	1. 2E+019	34			

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2017

Berdasarkan tabel 10 diatas menunjukkan bahwa hasil uji F dilihat dari nilai F nya sebesar 205,444 dan nilai sig  $0,000 < \alpha (0,005)$ . Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

### 3. Hasil Uji Koefisien Determinan (Adj.R<sup>2</sup>)

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, hal ini dapat terlihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (Adj.R<sup>2</sup>). Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel: 4.10**  
**Hasil Uji Adjusted R Square**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
					F change	Sig Fchange
1	.976	.952	.947	135362798	205.444	.000

*Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017*

Nilai Adj. R<sup>2</sup> pada tabel 11 diatas adalah sebesar ,947% artinya 94,7% variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil sedangkan, sisanya adalah sebesar 5,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.



## E. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya *flypaper effect* dengan menguji terjadi atau tidaknya *flypaper effect* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga menguji ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah, berdasarkan pengujian empiris yang telah dilakukan sesuai dengan hipotesis penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada DIY ditandai dengan nilai koefisien PAD yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai koefisien DAU selain itu dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan DAU memiliki pengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah, sebaliknya DBH tidak berpengaruh signifikan dan negatif pada Belanja Daerah, namun apabila diuji secara bersamaan ketiga variabel independen berpengaruh pada belanja daerah.

### 1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pertama menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Belanja Daerah, berdasarkan hasil uji tes yang dilakukan membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai sig dari Pendapatan Asli Daerah yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,05), hal ini disebabkan karena adanya peningkatan PAD yang dikelola oleh daerah membuat masyarakat sadar akan wajib pajak serta seimbang dalam pelayanan publik serta fasilitasnya, hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan PAD juga akan mempengaruhi Belanja

Daerah, karena kebutuhan masyarakat serta tuntutan publik yang harus terus diperbaharui, PAD berasal dari Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah yang kesemuanya adalah pelayanan publik yang harus selalu diperbaharui serta dipelihara agar masyarakat memperoleh manfaat dari hasil iuran pajak mereka.

Apabila PAD meningkat maka mempengaruhi kinerja keuangan daerah dimana dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, dengan naiknya PAD dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut mampu menggali potensi-potensi daerahnya seperti sumber daya alam atau pariwisatanya, sesuai dengan teori pelayanan yang dikemukakan *Davis, Schorman* dan *Donaldson* dalam Mutaqin, (2014) teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi dengan tujuan individu melainkan lebih termotivasi dengan sasaran hasil utama yang telah disepakati bersama, dalam hal ini para eksekutif yang menjalankan Pemerintah Daerah yang memiliki tujuan menaikkan PAD dengan salah satu cara yaitu memperbaiki fasilitas, menggali potensi daerah guna menaikkan tarif pajak, sehingga masyarakat merasa tidak sia-sia dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dan konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iskandar (2012) menyatakan bahwa tingkat kemandiriandalam APBD sangat terkait dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi PAD. Pemerintah Daerah menetapkan target

PAD berdasarkan potensi daerah dan realisasi PAD pada tahun lalu. Sehingga semakin tinggi realisasi pendapatan yang didapatkan dari PAD maka semakin tinggi pula dana yang harus diberikan Pemerintah Daerah melalui alokasi anggaran belanja daerah pada tahun berikutnya. Selain itu penelitian dari Oktavia (2014) yang meneliti mengenai *flypaper effect* di Jawa Timur pada periode 2003-2013 menyatakan bahwa apabila setiap kenaikan PAD 1 juta maka belanja daerah akan naik sebesar 1,820 juta, selanjutnya penelitian dari Saputri dan Dul Muid (2014) yang meneliti *flypaper effect* di Jawa Tengah 2011-2012 diperoleh kesimpulan bahwa PADt-1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah atau dengan kata lain PAD yang diterima Pemerintah daerah tahun anggaran sebelumnya mampu mempengaruhi daerah untuk melakukan belanja pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian penelitian dari Astutik (2016) yang meneliti pada Pemerintah Kabupaten/Kota DIY tahun 2008-2014 menghasilkan PAD yang signifikan terhadap belanja daerah karena dengan PAD yang tinggi akan meningkatkan BD salah satunya dengan meningkatkan subsidi Pemerintah Daerah pada pelayanan kepada masyarakat lapisan bawah.

Rahmawati (2015) dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan positif pada belanja daerah, selanjutnya Pemerintah Daerah yang memiliki tingkat PAD tinggi maka pengeluaran untuk pengalokasian belanja daerahnya pun semakin tinggi, selanjutnya Kurnia (2013) yang meneliti *flypaper effect* berdasarkan pemetaan indeks kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur

menunjukkan bahwa apabila PAD naik sebesar Rp. 1.000.000,- maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 1.697.085. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa PAD signifikan akan tetapi nilai koefisiennya jauh lebih rendah dibandingkan koefisien DAU terhadap BD, hasil ini mendukung penelitian Maimunah (2006), Melo (2005) dan Venter (2007) yang menyatakan flypaper effect terjadi ketika nilai Koefisien PAD lebih rendah terhadap BD, daripada nilai koefisien DAU terhadap BD, dan nilai keduanya signifikan.

## **2. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Daerah. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan juga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ditunjukkan dengan nilai sig dari Dana Alokasi Umum yang lebih kecil dari nilai (0,05). Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan DAU pada Belanja Daerah dengan baik, selain itu DAU merupakan bentuk dana perimbangan yang paling tinggi dibandingkan dengan DBH dan DAK, namun besaran DAU mempengaruhi apakah daerah tersebut mampu atau tidak untuk mandiri dalam kaitannya dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh *Jensen* dan *Meckling* dalam Arfianti (2011) bahwa pihak yang terlibat atau terlibat

dalam proses penyusunan anggaran cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya dengan mengalokasikan sumber daya dalam anggaran tersebut. Eksekutif yang berperan sebagai pengusul anggaran sekaligus sebagai pelaksana anggaran berupaya memaksimalkan tingkat jumlah anggaran, sedangkan legislatif atau DPR yang dipilih oleh rakyat berperan sebagai alat pengawasan anggaran, legislatif berwenang mengubah jumlah anggaran serta merubah distribusi belanja/pengeluaran (Rustiyarningsih, 2012)

Hal ini sesuai dengan penelitian Pramuka (2010) yang meneliti mengenai fenomena *flypaper effect* pada pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa, hasil penelitian membuktikan bahwa apabila DAU naik maka belanja daerah pun juga akan naik, selanjutnya apabila DAU tahun sebelumnya naik maka belanja daerah tahun ini pun juga naik, selain itu apabila DAU tahun sebelumnya naik maka belanja operasi tahun ini pun akan naik, kemudian penelitian dari Oktavia (2014) yang meneliti mengenai *flypaper effect* fenomena serial waktu dan lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2003-2013 menyimpulkan bahwa peningkatan DAU akan diikuti dengan peningkatan belanja daerah, hasilini menguatkan bahwa sebenarnya, Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih menggantungkan belanja daerahnya dengan DAU.

Kurnia (2013) yang meneliti mengenai analisis *flypaper effect* berdasarkan pemetaan indeks kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi studi kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa pada hasil tes didapatkan koefisien DAU pada model sebesar 1,291584 yang berarti bahwa apabila variabel lainnya tetap dan DAU naik sebesar Rp.

1.000.000,-maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 1.291.584, selanjutnya penelitian dari Aprilia dan Redo (2013) yang meneliti mengenai pengaruh *flypaper effect*, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan DAU berpengaruh signifikan positif pada pertumbuhan belanja daerah, disamping itu penelitian dari Amalia (2015) menyatakan bahwa apabila jumlah DAU membesar menyebabkan jumlah belanja daerahpun semakin besar pula, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien DAU yang mengalami kenaikan 1 persen maka akan meningkatkan BD sebesar 0,94 persen, dan sebaliknya, dikarenakan Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga bersifat umum untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan program desentralisasi.

Berdasarkan penelitian dari Saputri dan Dul Muid (2014) yang meneliti fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2012 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan lag maupun tanpa lag. Peneliti lain yaitu Adiputra (2014) yang meneliti mengenai *flypaper effect* di Kabupaten Karangasem membuktikan bahwa dari penelitiannya mengenai hasil analisis proporsi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 6 (enam) tahun mulai periode tahun 2005 – 2010, didapatkan hasil bahwa rata-rata

kontribusi sebesar 0,69 %, sehingga PAD dan DAU dapat dikatakan berkontribusi terhadap Belanja Daerah apabila prosentase kontribusi lebih besar dari rata – rata kontribusi yaitu sebesar 0,69 %, dan berdasarkan hasil penelitian kontribusi PAD dan DAU di tahun 2005 sebesar 0,72 % dengan total APBD senilai Rp. 283.202.089.998 dan di tahun 2006 kontribusi keduanya sebesar 0,79 % dengan total APBD senilai Rp. 395.961.738.998.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh didapat kesimpulan bahwa telah terjadi flypaper effect terbukti lebih tingginya koefisien dana alokasi umum dibandingkan koefisien PAD terhadap BD hal ini membuktikan penelitian Maimunah (2006), Melo (2005) dan Venter (2007) bahwa flypaper effect terjadi berdasarkan tingkat kenaikan atau penurunan PAD dan DAU.

### **3. DBH terhadap Belanja Daerah**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif pada alokasi Belanja Daerah. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditunjukkan dengan nilai sig dari Dana Bagi Hasil lebih besar dan negatif terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan oleh DBH yang merupakan salah satu Dana Perimbangan namun pengalokasiannya berbeda dengan DAU dan DAK, pengalokasian DBH tergantung dari Pajak dan Sumber Daya Alam masing-masing, hal ini berarti apabila perolehan pajaknya antara lain PBB, BPHTB, Pajak Penghasilan

WP,OP serta Sumber Daya Alamnya yang sedikit maka secara otomatis dana bagi hasilnya pun sedikit. Di DIY sendiri memang berbeda dengan daerah lain yang memiliki prosentase DBH bahkan lebih kecil daripada DAK, hal ini dikarenakan daerah ini, potensinya adalah pariwisata yang sebagiannya adalah pantai, untuk pertambangan hanya diperoleh dari hasil pertambangan pasir gunung merapi, dan mengingat sebagian wilayah seperti hutan sudah banyak tergesur seiring banyaknya populasi mahasiswa yang meningkat sehingga makin memperkecil prosentase DBH, selain itu DIY merupakan wilayah provinsi yang cukup kecil jika dibandingkan dengan Provinsi lain. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11 :

## Data Dana Bagi Hasil Seluruh Indonesia Tahun 2016

No.	Daerah	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
1	Prov. DKI Jakarta	13.867.897.878.000
2	Prov. Kalimantan Timur	4.095.361.151.000
3	Prov. Riau	1.893.170.867.000
4	Prov. Jawa Timur	1.847.551.635.000
5	Prov. Jawa Barat	1.600.468.149.730
6	Prov. Sumatera Selatan	1.483.326.786.000
7	Prov. Papua	1.299.465.912.000
8	Prov. Papua Barat	1.075.581.961.000
9	Prov. Jawa Tengah	919.026.530.000
10	Prov. Kalimantan Selatan	859.701.464.000
11	Prov. Kepulauan Riau	621.425.775.475
12	Prov. Sumatera Utara	515.917.601.900
13	Prov. Jambi	324.825.208.000
14	Prov. Kalimantan Utara	309.442.603.000
15	Prov. Aceh	251.589.610.000
16	Prov. Lampung	213.904.091.100
17	Prov. Kalimantan Barat	196.802.373.000
18	Prov. Nusa Tenggara Barat	192.824.364.808



No.	Daerah	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
19	Prov. Sumatera Barat	174.708.171.300
20	Prov. Bengkulu	164.476.079.000
21	Prov. Bali	153.658.478.951
22	Prov. Sulawesi Tengah	144.994.660.000
23	Prov. Maluku Utara	138.591.290.000
24	Prov. Sulawesi Utara	121.662.128.000
25	Prov. DI Yogyakarta	108.902.297.000
26	Prov. Maluku	88.267.452.000
27	Prov. Nusa Tenggara Timur	82.519.883.000
28	Prov. Gorontalo	29.046.717.000
29	Prov. Sulawesi Barat	27.348.371.000

*Sumber: Data sekunder yang diolah dari situs DJPK, 2017*

Dapat dilihat pada tabel bahwa Provinsi DIY memiliki dana bagi hasil ke 5 terendah apabila dibandingkan dengan daerah lainnya. Sedangkan yang paling parah adalah pada Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Fauziyah (2017) yang meneliti mengenai fenomena *flypaper effect* di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah yang memiliki potensi DBH yang tinggi saja tidak mampu untuk membiayai belanja modalnya hal ini dikarenakan DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan lain yang mendesak selanjutnya hasil dari Setiawan (2015) yang meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Pemprov DIY membuktikan bahwa besaran nilai  $t$  hitung dana bagi hasil

sebesar 1,407 ( $p=0,179>0,05$ ) artinya dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kemudian penelitian dari Gayatri (2017) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh karena DBH di Provinsi ini cukup kecil hal ini dikarenakan di Provinsi Bali sendiri mayoritas pariwisata sehingga tidak memiliki cukup SDA, selanjutnya penelitian dari Dwirandra (2016) yang meneliti mengenai Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal menyatakan bahwa Masuknya variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh dana bagi hasil pada belanja modal, ternyata juga tidak mampu memperkuat pengaruh dana bagi hasil pada belanja modal, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu memperkuat pengaruh dana bagi hasil pada belanja modal. Hal ini diduga karena DBH yang diterima oleh daerah dari Pusat bukanlah sumber utama pembiayaan Pemerintah Daerah untuk belanja daerahnya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa DBH bukanlah faktor terjadinya *flypaper effect* dikarenakan DBH tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap BD.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil peneliti sebelumnya yaitu dari Iskandar (2012) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, bahkan setiap peningkatan DBH sebesar 1 juta rupiah akan menambah belanja daerah sebesar 1,19 juta rupiah, senada dengan

Riswandi (2014) yang menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* di Aceh dikarenakan koefisien PAD terhadap BD, lebih rendah daripada koefisien DBH terhadap BD, selain itu hasil studi empiris Deller et al (2007), Darwanto dan Yulia (2007), Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Unconditional Grants* (DAU,DBH) merupakan bentuk dana transfer yang penting selain DAK.

